

---

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM DESTANA PADA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BPBD KABUPATEN SUMEDANG

Suherman\*<sup>1</sup>, Agan Nugraha<sup>2</sup>, Hendra Ali Nugraha<sup>3</sup>, Neneng Rita Karlina<sup>4</sup>, Nurholis Sa'adah<sup>5</sup>,  
Wulan Sari<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas Sebelas April

---

### Article Info

#### Article history:

Received Jul 12, 2025

Revised Nov 15, 2025

Accepted Nov 30, 2025

#### Keywords:

Public Policy

Implementation of Public Policy

Distaster Resilient Villager

---

### ABSTRACT

*This research aims to determine, obtain objective data and information about the implementation of the Disaster Resilient Village (DESTANA) program policy in the field of prevention and preparedness of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Sumedang Regency. In this study, researchers used descriptive qualitative research methods. The data collection techniques used were literature study, observation, interviews, and documentation. The technique of determining informants using purposive sampling with the number of research informants as many as 4 people, namely the Secretary of the Agency, the Head of the Prevention and Preparedness Section, and 2 Prevention and Preparedness Section Staff. The results showed that the implementation of the Disaster Resilient Village (DESTANA) program policy in the Prevention and Preparedness Section of the Sumedang Regency Regional Disaster Management Agency (BPBD) has not fully run optimally. This can be seen from several factors that hinder the implementation of program policies so that they do not run optimally, such as human resources that are still less competent, inadequate facilities and infrastructure, budget costs that are still insufficient, and communities that lack knowledge, understanding, and awareness of disaster hazards. Thus, it is very necessary to make efforts to minimize the obstacles that have occurred, such as improving the quality of human resources by conducting training and training.*



Copyright © 2025 JRPA. All rights reserved.

---

### Corresponding Author:

Suherman

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas April

Jl. Angkrek Situ No.19 Kelurahan Situ - Sumedang

Email: [suherman@unsap.ac.id](mailto:suherman@unsap.ac.id)

## 1. INTRODUCTION

Kabupaten Sumedang sebagai salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat yang dikategorikan sebagai daerah yang rentan terhadap terjadinya bencana alam, mengingat karakteristik geografi Kabupaten Sumedang yang terdiri dari dataran rendah dan bukit-bukit serta dikelilingi oleh rangkaian pegunungan yang membujur dari barat, timur, utara sampai selatan menjadikan sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang merupakan pegunungan, kecuali di sebagian kecil wilayah utara berupa dataran rendah. Gunung Tampomas (1.684 mdpl), merupakan dataran tertinggi di kabupaten ini yang berada di utara Sumedang. Adanya beberapa sesar seperti sungkup, antiklin serta baribis yang melewati Kabupaten Sumedang mengakibatkan sebagian besar wilayahnya rentan terhadap bencana alam tanah longsor. Disamping itu, faktor lain yang mempengaruhi Kabupaten Sumedang rentan terhadap bencana alam adalah kondisi geologi, meteorologi dan klimatologi, hidrologi dan demografi.

Berpedoman kepada kondisi fisik geografi dan topografi Kabupaten Sumedang yang rentan terhadap terjadinya bencana alam serta merujuk kepada beberapa peraturan dan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU 24/2007), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tanggal 22 Oktober 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Permendagri 46/2008) dan pada tanggal 11 November 2008 keluar Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 3/2008). Maka Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana selanjutnya menetapkan beberapa peraturan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 telah menetapkan Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang. Dalam tugas harian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang dipimpin oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah *ex officio* yaitu Sekretaris Daerah yang dibantu oleh unsur pelaksana untuk menjalankan roda organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) meliputi kepala pelaksana, sekretaris, seksi pencegahan dan kesiapsiagaan, seksi kedaruratan dan logistik serta seksi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kehadiran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai upaya mencegah dan meminimalisir potensi ancaman bahaya bencana sekaligus sebagai upaya pemerintah Kabupaten Sumedang dalam menerapkan kebijakan berlakunya otonomi daerah yang menggariskan kewajiban daerah untuk menata urusan pemerintah di daerah.

Dengan demikian perlu adanya penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan upaya meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko bencana tersebut dapat dilakukan dengan adanya program Desa Tangguh Bencana yang dibentuk oleh pemerintah dan diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 1 tahun 2012. Desa Tangguh bencana sering disebut destana dan merupakan desa yang memiliki kemandirian untuk menghadapi bencana yang terjadi serta memulihkan dari dampak yang merugikan.

Kabupaten Sumedang sudah membentuk program Desa Tangguh Bencana sejak tahun 2019 dan baru direalisasikan pada tahun 2021, terdapat 277 desa di Kabupaten Sumedang yang akan melaksanakan program Desa Tangguh Bencana, Beberapa desa yang sudah ditindaklanjuti dengan peningkatan kapasitas sudah diberi ilmu dan wawasan terkait ancaman dan kerentanan di desa tersebut, dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang memberikan edukasi dan pemetaan suatu wilayah berdasarkan karakteristik kerentanan bencana serta jumlah penduduk kepada perangkat daerah yang ada di Kabupaten Sumedang.

Setelah melakukan observasi, peneliti menemukan adanya beberapa indikasi yang menjadi kendala Implementasi Kebijakan Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Sumedang antara lain Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait dengan daerah rawan bencana

karena belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Badan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang. Hal ini dapat dilihat ketika terjadinya bencana, masyarakat yang terkena dampak bencana terkadang tidak mengikuti arahan untuk beralih ke tempat tinggal sementara atau posko supaya lebih layak dan aman dari bencana yang telah disediakan oleh Badan Penanggulangan Badan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang. Hal ini dapat menyebabkan masa transisi ketika terjadi bencana tidak berjalan dengan baik, Sumber daya manusia di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang belum sesuai kriteria, khususnya di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Hal ini dapat dilihat dari kompetensi pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang yang masih belum kurang optimal, seperti pegawai di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang masih belum sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan, Sarana dan prasarana dalam mengurangi resiko bencana masih kurang memadai. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan alat pendukung pencegahan yang masih kurang seperti alat ukur kemiringan dan ketebalan tanah.

Adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang.

## 2. METHOD

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alami, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci (Sugiyono, 2014). Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (penggabungan), data yang dihasilkan bersifat deskriptif, dan analisis data dilakukan secara induktif, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Taylor dan Bogdan (dalam Afrizal, 2017: 12) menyebutkan bahwa, “metode penelitian kualitatif diartikan sebagai cara untuk dipakai oleh para peneliti untuk memecahkan masalah dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitiannya”.

Untuk pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Sedangkan pengolahan dan analisis data yang digunakan melalui data display, reduksi data, penarikan kesimpulan, dan triangulasi data. Dalam penelitian ini yang menjadi Sasaran seluruh pegawai BPBD sedangkan yang menjadi informan penelitian terdiri dari Kepala Pelaksana Kepala Pelaksana; Sekretaris; Bendahara; Sekertariat; Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; Seksi Kedaruratan dan Logistik.

## 3. RESULTS AND DISCUSSION

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang makaterdapat pembahasan dari setiap dimensi hasil penelitian sebagai sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang:
  - a. Berdasarkan dimensi Komunikasi dalam pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) cukup optimal dimulai dari kejelasan terhadap aturan yang ada tentang pembentukan program Desa Tangguh Bencana sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dan kejelasan terhadap aturan yaitu dengan adanya Surat Keputusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Desa Tangguh Bencana dimana surat keputusan ini ditujukan kepada 277 Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Sumedang. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang sudah melakukan peningkatan kapasitas terhadap sasaran program sosialisasi yang dilakukan oleh implementor dengan membuat suatu kegiatan pertemuan rutin yang melibatkan Desa yang sudah menjadi Desa Tangguh Bencana.
  - b. Berdasarkan dimensi sumber daya dalam pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana sudah cukup optimal Pada pengetahuan dan kemampuan pelaksana dalam menguasai aturan sudah dinilai baik. Akan tetapi Fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan Desa Tangguh Bencana dinilai kurang memadai.
  - c. Berdasarkan dimensi disposisi dalam pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) sudah optimal dapat dilihat dalam hal Pada pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana diprioritaskan pada Desa/Kelurahan yang rawan terhadap bencana. Pelaksanaan musyawarah dilakukan sebagaimana fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- yaitu koordinasi.
- d. Berdasarkan dimensi struktur birokrasi dalam pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) sudah optimal. Pada pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana, koordinasi dinilai sudah baik sebagaimana fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana terdapat kerjasama yang baik antara pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan pihak ketiga, dimana pihak ketiga disini membantu dalam penyediaan sarana dan prasarana ketika terjadi bencana.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) antara lain sebagai berikut.
    - a. Dalam dimensi logika yang digunakan oleh suatu kebijakan dalam tujuan dan sasaran kegiatan mengalami hambatan yaitu dari segi anggaran sehingga dapat menghambat dalam pengimplementasian program Desa Tangguh Bencana (Destana).
    - b. Berdasarkan hambatan-hambatan mengenai dimensi hakikat kerjasama yang dibutuhkan di dalam koordinasi dan komunikasi terdapat hambatan karena pihak pelaksana yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang tidak bisa bergerak sendiri dan untuk mendapatkan hasil yang baik diperlukan suatu koordinasi dan komunikasi
    - c. Berdasarkan hambatan-hambatan mengenai kemampuan sumber daya pihak pelaksana mengalami kesulitan terhadap sumber daya yang kurang memadai.
  3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) antara lain sebagai berikut.
    - a. Upaya yang dilakukan di dalam dimensi Logika Yang Digunakan Oleh Suatu Kebijakan dalam tujuan dan sasaran kegiatan terutama dalam anggaran pihak pelaksana dalam menjalankan tugas program Desa Tangguh Bencana (Destana) tidak terpaku terhadap anggaran karena memiliki semangat kemanusiaan yang tinggi sehingga mengesampingkan hambatan dengan memaksimalkan anggaran yang ada.
    - b. Berdasarkan hambatan-hambatan mengenai koordinasi dan komunikasi pihak pelaksana harus selalu berkoordinasi dengan pihak sasaran program ataupun pihak yang terlibat dalam program Desa Tangguh Bencana (Destana) ini, dengan tujuan sebagai berikut: mengetahui perkembangan setiap panitia program Desa Tangguh Bencana (Destana), memantau semua kegiatan yang dilakukan oleh panitia program Desa Tangguh Bencana (Destana), memberikan semua dukungan dari pihak yang terkait. Selain itu pihak pelaksana program juga harus mampu menjalin komunikasi secara koordinatif, komunikasi dengan sasaran program dilakukan dengan rapat dan koordinasi.
    - c. Berdasarkan hambatan-hambatan mengenai sumber daya yang kurang memadai pihak pelaksana yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang membentuk panitia relawan sesuai peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana no 17 tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana.

#### 4. CONCLUSION

Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Program Desa Tangguh Bencana (Destana) di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang, sudah dilaksanakan sesuai dengan faktor keberhasilan implementasi secara efektif dan efisien, akan tetapi masih belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian bahwa program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di Kabupaten Sumedang memiliki dimensi komunikasi yang cukup optimal, terlihat dari kejelasan aturan dan pembentukan panitia. Sumber daya seperti pengetahuan dan kemampuan pelaksana dinilai baik, namun fasilitas yang mendukung dianggap kurang memadai. Dalam dimensi disposisi, program ini diimplementasikan dengan baik, terutama di Desa/Kelurahan yang rawan terhadap bencana, dengan pelaksanaan musyawarah dan koordinasi yang optimal. Secara keseluruhan, dimensi struktur birokrasi juga dinilai optimal, dengan koordinasi yang baik antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pihak ketiga, dan Desa Tangguh Bencana.

Faktor penghambat implementasi kebijakan program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang diantaranya yaitu terkait dengan aspek anggaran, yang dapat menghambat tujuan dan sasaran kegiatan. Selain itu koordinasi dan komunikasi yang efektif antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang dan pihak pelaksana menjadi hal yang penting untuk kesuksesan program. Kemudian

kesulitan pihak pelaksana dalam menghadapi keterbatasan sumber daya dapat mempengaruhi pelaksanaan program secara menyeluruh.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) yaitu pelaksana menunjukkan fleksibilitas terhadap anggaran dengan semangat kemanusiaan tinggi, memaksimalkan penggunaan anggaran yang ada untuk melaksanakan program Desa Tangguh Bencana (DESTANA). Kemudian upaya intensif dalam koordinasi dan komunikasi menjadi fokus, di mana pihak pelaksana secara aktif berkoordinasi dengan pihak sasaran program dan pihak terkait, memantau perkembangan dan memberikan dukungan yang dibutuhkan. Selain itu, komunikasi koordinatif dengan sasaran program dilakukan melalui rapat dan koordinasi. Untuk mengatasi kendala sumber daya yang kurang memadai, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang membentuk panitia relawan

## REFERENCES

- Afrizal. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, S. (2016). *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Bungin, B. (2017). *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Emzir. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Maksudi, B. I. (2017). *Dasar Dasar Administrasi Publik*. Depok: Rajawali Pres.
- Mulyadi, D. (2018). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyawati, C. (2021). *Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang*. Sumedang: STIA Sebelas April sumedang.
- Mussofa, D. A. (2023). *Implementasi Program Desa Tangguh Bencana Di Desa Teluk Bakung Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat*. Kubu Raya: IPDN.
- Nugroho, D. M. (2019). *Kebijakan Publik: Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik*. Banten: CV. AA. RIZKY.
- Pasolong, H. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.